

Membumikan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Etika Politik: Menuju Demokrasi Pancasila yang Maju dan Berkeadilan

Grounding Pancasila Values as Political Ethics: Towards an Advanced and Just Pancasila Democracy

Muh. Nur Himawan¹, Indah Tandi Linggi², Putri Elizabeth³, Muhammad Falih Saputra⁴, Bill Jhon Kurniawan Samuda⁵, Agung Zulfadli⁶

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
²³⁴⁵⁶⁷Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

muhnurhimawan81@gmail.com* | indahtandi02@gmail.com | putrielizabeth636@gmail.com | muhfalisaputra@gmail.com | billjhonsamuda@gmail.com | agungzulfadli52@gmail.com

Abstrak. Dalam kehidupan politik Indonesia, Pancasila memainkan peran penting sebagai prinsip pedoman untuk perilaku etis. Sebagai ideologi dasar negara, Pancasila mencakup nilai-nilai seperti kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Namun, penerapan nilai-nilai ini dalam politik menghadapi berbagai tantangan. Makalah ini membahas pentingnya Pancasila sebagai etika politik, penerapannya dalam kehidupan politik Indonesia, dan hambatan yang dihadapi. Ini menyarankan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik tentang Pancasila, memperkuat supremasi hukum dan demokrasi, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola, mendorong partisipasi warga dalam politik, dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi Pancasila dalam konteks politik kontemporer.

Kata Kunci: Pancasila, etika politik, Indonesia, demokrasi

Abstract. In Indonesian political life, Pancasila plays a crucial role as the guiding principle for ethical conduct. As the foundational ideology of the nation, Pancasila encompasses values such as belief in God, humanity, unity, democracy, and social justice. However, the application of these values in politics faces numerous challenges. This paper discusses the importance of Pancasila as political ethics, its application in Indonesian political life, and the obstacles encountered. It suggests continuous efforts to enhance public understanding and awareness of Pancasila, strengthen the rule of law and democracy, promote transparency and accountability in governance, encourage citizen participation in politics, and conduct further research on the implementation of Pancasila in contemporary political contexts.

Keywords: Pancasila, political ethics, Indonesia, democracy

1. PENDAHULUAN

Etika politik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena merupakan landasan moral yang mengatur perilaku para pemimpin dan warga negara dalam menjalankan tugas-tugas politiknya. Etika politik menegaskan pentingnya integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan prinsip-prinsip moral lainnya dalam setiap tindakan politik.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristotle, "Politik tanpa etika adalah sesuatu yang tidak bermoral dan tidak bermartabat" (Rowe & Broadie, 2002). Dalam konteks Indonesia, di mana politik sering kali diwarnai oleh praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi, etika politik menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa kepemimpinan dan pengambilan

keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan moralitas yang tinggi.

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, juga memiliki peran yang krusial dalam menegakkan etika politik. Pancasila menekankan pada nilai-nilai seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi pedoman bagi setiap tindakan politik yang dilakukan oleh para pemimpin dan warga negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Soekarno, "Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara" (Handayani & Dewi. 2021).

Namun, ketika melihat kondisi aktual kehidupan berpolitik di Indonesia, terdapat gap yang cukup besar antara idealisme Pancasila dengan realitas politik yang ada. Praktik korupsi, politik identitas, dan pertarungan kekuasaan masih sering mengungguli semangat moralitas dan keadilan dalam politik. Penelitian oleh Transparency International Indonesia menemukan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius dalam berbagai aspek kehidupan politik di Indonesia, mulai dari tingkat pemerintahan pusat hingga tingkat lokal (Fatkhuri, 2019). Selain itu, polarisasi politik yang semakin meningkat dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi tantangan besar dalam mewujudkan etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memperkuat implementasi etika politik di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik yang menekankan pada nilai-nilai moral dan etika dalam berpolitik, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta penguatan institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Hanya dengan upaya bersama dari semua pihak, Indonesia dapat mengembangkan sistem politik yang lebih bersih, transparan, dan berlandaskan pada nilai-nilai moral yang tinggi, sesuai dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi, "Politik

tidak boleh dipisahkan dari etika dan moralitas" (Wiguna, 2017).

Rumusan masalah dalam penelitian ini bertumpu pada pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik, penerapannya dalam kehidupan berpolitik di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Pertama, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan bagaimana nilai-nilai tersebut menjadi landasan etika politik dalam konteks Indonesia. Kedua, penelitian ini akan menganalisis secara kritis bagaimana nilai-nilai Pancasila diaplikasikan dalam praktik politik sehari-hari di Indonesia, baik dalam kebijakan publik maupun dalam perilaku para pemimpin dan warga negara. Ketiga, penelitian ini juga akan menyoroti tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan penerapan Pancasila sebagai etika politik yang kokoh dan konsisten. Dengan mengidentifikasi nilai-nilai, menganalisis penerapannya, serta mendeskripsikan tantangan dan hambatannya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran Pancasila dalam membentuk etika politik Indonesia dan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan implementasinya.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengadopsi pendekatan studi literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Studi literatur akan mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber terpercaya lainnya yang membahas tentang Pancasila dan etika politik. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini, penelitian akan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dan diterapkan dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis tematik, yang melibatkan proses identifikasi, kategorisasi, dan analisis data kualitatif untuk menemukan pola dan makna yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik. Dalam melakukan analisis tematik, penelitian ini akan memperhatikan aspek-aspek penting seperti integritas, keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial, yang merupakan nilai-nilai inti dalam Pancasila.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Nilai-nilai Pancasila sebagai Etika Politik

Salah satu nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan utama dalam etika politik adalah Ketuhanan. Ketuhanan dalam Pancasila tidak hanya merujuk pada kepercayaan terhadap Tuhan, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam kehidupan berpolitik. Hal ini tercermin dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang menegaskan keragaman agama dan kepercayaan sebagai kekayaan yang harus dijaga bersama. Dalam konteks politik Indonesia, penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan kepercayaan menjadi dasar penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan politik. Sebagaimana diungkapkan oleh Soekarno, "Kita harus menghormati agama dan kepercayaan setiap warga negara, karena agama adalah masalah pribadi, hak asasi setiap individu, dan bukanlah urusan negara" (Faridah, 2018).

Selanjutnya, nilai Kemanusiaan dalam Pancasila juga memiliki peran yang sangat penting dalam etika politik. Kemanusiaan menekankan pada pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan berpolitik. Dalam konteks politik, nilai kemanusiaan mendorong para pemimpin dan warga negara untuk bertindak dengan empati dan keadilan terhadap sesama, tanpa memandang perbedaan latar belakang, suku, agama, atau status sosial. Pergaulan politik yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan akan memastikan bahwa kebijakan publik dan tindakan politik selalu memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta, "Pancasila menghendaki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (Susilo dkk, 2022).

Nilai Persatuan dalam Pancasila menekankan pentingnya mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi beragam perbedaan dan diversitas yang ada. Persatuan menjadi salah satu pilar utama dalam membangun fondasi politik yang kuat dan stabil di Indonesia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Soekarno, "Bhinneka Tunggal Ika, itulah semboyan negara kita, yang berarti

'Berbeda-beda tetapi satu juga'." Dalam konteks politik, nilai Persatuan memerlukan kesadaran akan pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan, baik dalam hal budaya, agama, suku, maupun pandangan politik. Penekanan pada persatuan bangsa mengharuskan para pemimpin dan warga negara untuk menjauhi sikap sektarianisme dan segala bentuk paham yang dapat memecah belah masyarakat.

Lebih lanjut, promosi persatuan dalam etika politik mencakup upaya untuk memperkuat solidaritas antarwarga negara serta membangun ikatan emosional dan sosial yang kuat di antara mereka. Ini berarti bahwa dalam setiap tindakan politik, kesadaran akan pentingnya mempertahankan persatuan dan menjaga keutuhan negara harus senantiasa diutamakan. Pandangan politik dan kepentingan pribadi tidak boleh mengungguli semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai bagian dari persatuan, juga penting untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang perbedaan dan diskriminasi. Dalam kata-kata Bung Karno, "Persatuan adalah kunci kekuatan dan kemandirian bangsa" (Farhan, 2022).

Nilai Kerakyatan dalam Pancasila menegaskan pentingnya mewujudkan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang berlandaskan pada semangat keterbukaan, partisipasi, dan pengambilan keputusan yang inklusif. Konsep kedaulatan rakyat mengisyaratkan bahwa kekuasaan politik ada di tangan rakyat sebagai pemegang hak-hak politik yang merdeka. Dalam konteks politik Indonesia, nilai Kerakyatan mengandung arti bahwa proses pengambilan keputusan politik harus dilakukan secara partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat (Jati, 2012). Sebagaimana diungkapkan oleh Bung Hatta, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."

Sementara nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila menekankan pentingnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Keadilan sosial menuntut adanya distribusi yang merata atas sumber daya dan kesempatan, serta peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka (Pattipeilohy, L., & Saingo, 2023). Dalam konteks

politik, nilai Keadilan Sosial memerlukan adanya kebijakan dan tindakan politik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Soekarno, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dengan memperkuat nilai-nilai Kerakyatan dan Keadilan Sosial dalam etika politik, Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk sistem politik yang lebih demokratis dan inklusif, di mana hak-hak rakyat dihormati dan keadilan sosial menjadi prioritas utama. Dengan memastikan partisipasi aktif rakyat dalam proses politik dan dengan menerapkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, Indonesia dapat mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan bagi semua warganya.

b. Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berpolitik

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berpolitik di Indonesia tercermin secara konkret melalui penggunaan Pancasila sebagai dasar konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara. Sebagai nilai-nilai yang mendasari ideologi dan falsafah bangsa, Pancasila menjadi pijakan utama dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi tertulis Indonesia, menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Dalam Pasal 29 ayat (1), UUD 1945 menyatakan, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Selain itu, Pancasila juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam penyusunan dan implementasi kebijakan.

Penggunaan Pancasila sebagai dasar konstitusi dan peraturan perundang-undangan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik politik sehari-hari. Melalui landasan Pancasila, kebijakan-kebijakan publik dapat dirancang untuk mempromosikan keadilan, persatuan, demokrasi, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, Pancasila bukan hanya menjadi panduan moral, tetapi juga instrumen konkret dalam

menjaga stabilitas politik dan keadilan sosial di Indonesia.

Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu wujud nyata dari penerapan prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Pancasila menekankan pada kedaulatan rakyat dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik, yang menjadi inti dari sistem demokrasi. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila tercermin dalam proses pemilihan umum yang dilakukan secara berkala untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara. Dengan adanya pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih para pemimpinnya, sehingga proses pembentukan kebijakan dapat mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat secara lebih akurat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, "Pemilu adalah pesta demokrasi, kesempatan bagi rakyat untuk menentukan masa depan negara" (Dedi, 2019).

Kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik sehari-hari di Indonesia. Sebagai instrumen yang mengatur arah dan tujuan pembangunan negara, kebijakan publik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi fokus utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dengan memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan mengedepankan prinsip keadilan sosial, kebijakan publik dapat menjadi alat untuk menciptakan perubahan yang positif dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu contoh konkret dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik adalah adanya program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja. PKH, sebagai program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan kemanusiaan. Melalui PKH, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, sejalan dengan semangat

solidaritas sosial yang diamanatkan oleh Pancasila.

Sementara itu, Kartu Prakerja merupakan program pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengikuti pelatihan kerja secara gratis, Kartu Prakerja mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Melalui program-program seperti ini, kebijakan publik menjadi sarana untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan konkret yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Budaya politik masyarakat Indonesia mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi antarwarga negara maupun dalam praktik politik formal. Salah satu aspek penting dari budaya politik adalah cara masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam proses politik, baik itu melalui pemilihan umum, diskusi publik, atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam budaya politik masyarakat Indonesia tercermin dalam semangat gotong royong, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta rasa solidaritas antarwarga negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bung Karno, "Politik yang didasarkan pada Pancasila harus merupakan politik musyawarah yang demokratis" (Hanafi, 2013).

Budaya politik masyarakat Indonesia juga mencakup sikap dan perilaku politik yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam praktiknya, nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi tercermin dalam cara masyarakat Indonesia berinteraksi dalam ranah politik. Misalnya, sikap saling menghormati, toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan semangat untuk mencapai keadilan sosial merupakan contoh dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam budaya politik masyarakat Indonesia.

Selain fungsi-fungsi yang telah disebutkan, budaya politik juga mencerminkan cara masyarakat Indonesia menghargai dan memahami institusi-institusi politik yang ada. Penghargaan terhadap partai politik, lembaga

legislatif, dan pemerintah menjadi bagian integral dari budaya politik yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam budaya politik tercermin dalam pengakuan terhadap proses demokratis dan prinsip-prinsip aturan yang berlaku dalam sistem politik.

Penghargaan terhadap institusi politik menandakan adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut sebagai representasi kehendak rakyat dan penegak nilai-nilai demokrasi. Partai politik, sebagai wadah untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat, dihargai ketika mereka mengedepankan program-program yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Lembaga legislatif, sebagai representasi rakyat dalam pembuatan undang-undang, dihargai ketika mereka bertindak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta menjaga kemandirian dan independensinya dari kekuatan eksternal. Begitu pula dengan pemerintah, yang dihargai ketika mereka menjalankan tugasnya dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam konteks budaya politik yang berbasis Pancasila, sikap dan perilaku politik yang bermoral dan beretika menjadi sangat penting. Keterlibatan aktif dalam proses politik, baik melalui partisipasi dalam pemilihan umum maupun dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, merupakan cermin dari kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diamanatkan oleh Pancasila. Sikap saling menghormati, toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan semangat untuk mencapai kebaikan bersama adalah nilai-nilai yang tercermin dalam budaya politik yang berlandaskan Pancasila.

Dengan demikian, budaya politik masyarakat Indonesia menjadi cermin dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sikap, perilaku, dan partisipasi politik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dapat memperkuat fondasi politiknya untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera..

c. Tantangan dan Hambatan

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai etika

politik di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai tersebut di kalangan masyarakat. Pemahaman yang rendah terhadap Pancasila dapat menyebabkan minimnya apresiasi terhadap pentingnya etika politik yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan keadilan. Banyak warga negara yang belum memahami secara mendalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, sehingga cenderung mengabaikan atau bahkan melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dalam berpolitik.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila dapat menjadi akar dari berbagai permasalahan politik dan sosial yang terjadi di Indonesia, seperti praktik korupsi, politik identitas, dan intoleransi. Tanpa pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila, masyarakat cenderung terjebak dalam polarisasi politik dan konflik yang dapat mengancam persatuan dan keutuhan bangsa. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud MD, "Pemahaman yang kurang akan nilai-nilai Pancasila dapat menyebabkan kerancuan dalam menjalankan etika politik" (Adonara, 2015).

Praktik politik yang masih berorientasi pada kepentingan pribadi dan golongan merupakan salah satu hambatan utama dalam mewujudkan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Fenomena ini termanifestasi dalam berbagai praktik politik, mulai dari politik transaksional hingga korupsi, yang seringkali didorong oleh motif keuntungan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan yang lebih luas atau kesejahteraan bersama.

Dalam konteks politik, orientasi pada kepentingan pribadi dan golongan dapat mengaburkan visi dan misi politik yang seharusnya bertumpu pada pelayanan masyarakat dan pembangunan negara. Alih-alih berfokus pada kebutuhan dan aspirasi rakyat, praktik politik yang berorientasi pada kepentingan pribadi cenderung mengabaikan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

Penyebab dari praktik politik semacam ini bisa berasal dari berbagai faktor, mulai dari kurangnya pengawasan yang ketat terhadap

pelaksanaan kebijakan publik hingga budaya politik yang masih didominasi oleh patronase dan nepotisme (Tampubolon dkk, 2023). Selain itu, kurangnya kesadaran moral dan etika politik yang kuat di kalangan para pemimpin politik juga dapat menjadi pemicu utama praktik politik yang berorientasi pada kepentingan pribadi dan golongan.

Lemahnya penegakan hukum dan budaya demokrasi merupakan tantangan serius dalam mewujudkan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Penegakan hukum yang lemah dapat menyebabkan ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan keadilan. Di sisi lain, budaya demokrasi yang belum matang dapat menyebabkan politik yang tidak stabil, polarisasi masyarakat, dan konflik politik yang berkepanjangan.

Penegakan hukum yang lemah seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk korupsi, ketidakcukupan sumber daya manusia dan finansial, serta intervensi politik dalam sistem peradilan (Febrio dkk, 2024). Korupsi di dalam sistem penegakan hukum dapat mengakibatkan terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan, serta menurunkan integritas dan kredibilitas institusi hukum. Di samping itu, ketidakcukupan sumber daya manusia dan finansial dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga kasus-kasus pelanggaran hukum seringkali tidak ditindaklanjuti dengan tegas. Selain itu, intervensi politik dalam sistem peradilan dapat mempengaruhi independensi lembaga peradilan dan memicu penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu, budaya demokrasi yang belum matang juga merupakan hambatan utama dalam mewujudkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik. Budaya demokrasi yang belum matang ditandai oleh minimnya penghargaan terhadap hak asasi manusia, keterbatasan partisipasi politik, serta rendahnya tingkat literasi politik di kalangan Masyarakat (Sulianta, 2020). Hal ini dapat menghambat terciptanya ruang publik yang inklusif dan terbuka bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik di Indonesia,

diperlukan upaya reformasi yang mendalam dalam dua aspek utama, yaitu sistem hukum dan peradilan, serta pembangunan budaya demokrasi yang lebih kuat dan inklusif.

Pertama, reformasi hukum dan peradilan menjadi sangat penting sebagai langkah awal untuk memperbaiki kondisi politik dan sosial di Indonesia. Penguatan independensi lembaga peradilan merupakan salah satu prioritas utama dalam reformasi hukum. Independensi yang kuat akan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan didasarkan pada hukum dan keadilan, bukan pada tekanan politik atau kepentingan pribadi. Selain itu, peningkatan kapasitas penegakan hukum juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan efektif di semua tingkatan. Hal ini meliputi peningkatan kualitas penyidikan, penuntutan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran korupsi dan kejahatan lainnya. Memberantas korupsi secara tuntas juga menjadi fokus utama dalam upaya reformasi hukum, karena korupsi telah lama menjadi salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kedua, pembangunan budaya demokrasi yang lebih kuat dan inklusif diperlukan untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan berkeadilan. Upaya meningkatkan literasi politik di kalangan masyarakat menjadi kunci dalam membangun budaya demokrasi yang matang. Masyarakat yang terampil secara politik akan lebih mampu memahami dan mengkritisi kebijakan-kebijakan publik serta melakukan partisipasi yang aktif dalam proses politik. Selain itu, partisipasi politik yang diperkuat, termasuk melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipatif lainnya, akan memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah juga perlu mengedepankan nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan sosial, dan kemanusiaan dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan, sehingga memastikan bahwa pembangunan demokrasi berjalan sejalan dengan semangat dan cita-cita bangsa Indonesia.

Dengan demikian, melalui reformasi yang mendalam dalam sistem hukum dan peradilan, serta pembangunan budaya demokrasi yang lebih kuat dan inklusif, Indonesia dapat memperkuat fondasi politiknya untuk

menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, berkeadilan, dan sejahtera bagi semua warganya. Upaya ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga peradilan, maupun masyarakat sipil, untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

4. KESIMPULAN

Pancasila sebagai etika politik memberikan kerangka kerja moral yang penting bagi penyelenggaraan negara di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, yang meliputi Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, tidak hanya menjadi landasan filosofis negara, tetapi juga menjadi panduan bagi setiap tindakan politik yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, meskipun nilai-nilai Pancasila telah dijadikan dasar negara, penerapan dan implementasinya dalam kehidupan berpolitik masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Banyak warga negara yang belum memahami secara mendalam arti dan makna dari setiap sila Pancasila, sehingga seringkali terjadi penyimpangan dalam praktik politik yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Upaya yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pancasila sebagai panduan moral dalam berpolitik.

Selain itu, penegakan hukum dan pembangunan budaya demokrasi juga menjadi tantangan penting dalam mewujudkan penerapan nilai-nilai Pancasila. Lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan intervensi politik dalam sistem peradilan dapat menghambat upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan. Demikian pula, budaya politik yang masih didominasi oleh praktik-praktik yang tidak etis dan berorientasi pada kepentingan pribadi juga menjadi penghalang bagi terciptanya tatanan politik yang berlandaskan Pancasila.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dari semua pihak. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dapat dilakukan melalui pendidikan politik yang lebih intensif, baik di

sekolah maupun melalui berbagai program penyuluhan dan sosialisasi. Sementara itu, penegakan hukum yang kuat dan independen, serta pembangunan budaya demokrasi yang inklusif dan partisipatif, akan menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan dalam mewujudkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik di Indonesia, diperlukan sejumlah saran yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan perlu diperkuat di sekolah dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan materi tentang Pancasila dan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan, serta menyelenggarakan program-program pendidikan informal di masyarakat.

Kedua, sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada para pemimpin politik dan penyelenggara negara sangat penting. Melalui pelatihan, workshop, dan diskusi, para pemimpin politik dapat diberi pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas publik mereka.

Ketiga, peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan memberlakukan standar transparansi yang tinggi dan memperkuat lembaga pengawasan, masyarakat dapat lebih percaya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keempat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan publik merupakan langkah penting untuk membangun demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui mekanisme partisipatif seperti forum diskusi, konsultasi publik, dan pemilihan umum, masyarakat dapat memiliki suara yang lebih kuat dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan negara.

Terakhir, penelitian lebih lanjut terkait dengan penerapan Pancasila dalam konteks politik terkini perlu dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara

konkret dalam kehidupan berpolitik. Dengan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mewujudkan visi Pancasila sebagai fondasi moral bagi kehidupan politik di Indonesia. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut secara bersama-sama, diharapkan Indonesia dapat melangkah maju menuju tatanan politik yang lebih demokratis, berkeadilan, dan berbudaya Pancasila.

Dengan upaya berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman masyarakat, meningkatkan penegakan hukum, dan membangun budaya demokrasi yang kuat, Indonesia dapat melangkah menuju visi sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, di mana keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya menjadi prioritas utama.

5. REFERENSI

- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236.
- Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 213-226.
- Farhan, M. F. (2022). Peran Nasionalisme dalam Kemandirian Bangsa dan Kemandirian Industri Pertahanan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 52-58.
- Faridah, S. (2018). Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 199-214.
- Fatkhuri, F. (2019). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 278-297.
- Febrio, I., Baihaqi, A. F. C., Handayani, K. F., & Azhara, A. (2024). Indikator Delik Suap dan Gratifikasi. *Jurnal Anti Korupsi*, 4(1), 1-19.
- Hanafi, M. (2013). Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 95778.
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 6-12.

- Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 329-342.
- Pattipeilohy, L., & Saingo, Y. A. (2023). Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10).
- Rowe, C. J., & Broadie, S. (Eds.). (2002). *Nicomachean ethics*. Oxford University Press, USA.
- Sulianta, F. (2020). Literasi Digital, Riset dan Perkembangannya dalam Perspektif Social Studies. Feri Sulianta.
- Susilo, J., Junaedi, M., Tirtoni, F., Sarika, S. B., Astuti, C. C., & Fediyanto, N. (2022). Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pada Cerita Rakyat Dari Desa-Desa Di Sidoarjo. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6(1), 33-39.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *Birokrasi & Good Governance*.
- Wiguna, I. M. A. (2017). UNIVERSALITAS MAHATMA GANDHI. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 4(1).